

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chayes, Abram, dan Antonia Handler Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*. Harvard University Press, 1995.
- Cornelis, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia - Perspektif Hukum Laut Internasional*. Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019.
- Dahuri, R. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*. PKSPL-IPB, Jakarta, 2010.
- Franck, Thomas. *The Power of Legitimacy Among Nations*. Oxford University Press, 1990.
- Guzman, Andrew T. *How International Law Works: A Rational Choice Theory*. Oxford University Press, 2008.
- Brownlie, Ian *Principles of Public International Law 8th Edition*, Oxford University Press, Oxford, 2012.
- Ibrahim, J. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. VI. Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung, 2020.
- Istanto, F. Sugeng, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta, 1998.
- Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.
- Kusumaatmadja, M. & Agoes, E. R. *Pengantar Hukum Internasional*. P.T. Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, B. *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Edisi Ke-2, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Parthiana, I. Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Riry, Welly Angela, et al. *Buku Ajar Hukum Laut Internasional*, Widina, Jakarta, 2023.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sodik, D. M, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

- Soekanto, S., Mamudji, S. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soemitro, R, H, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018.
- Starke. J. G, *Introduction to International Law: 7th Edition*, Butterworths, London, 1972.
- Starke. J. G, *Pengantar Hukum Internasional alih bahasa oleh Bambang Iriana Djajaatmadja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2019.
- Syofyan, Ahmad, *Hukum Internasional*, Pusat Kajian Konstitusi dan Perundang-undangan Universitas Lampung, Lampung, 2022.
- Thontowi. J, Iskandar. P, *Hukum Internasional Kontemporer*. PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Yuliantiningsih. A, Indriati. Noer, Wismaningsih, *Buku Ajar Hukum Laut Pengaturannya dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Universitas Jenderal Soedirman Press, Purwokerto, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- Undang- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law Of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603.
- Putusan Permanent Court of Arbitration 2016 terhadap Gugatan Filipina kepada Tiongkok atas Sengketa Laut China Selatan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6874.
- Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC).

Sumber Lainnya

- Azhar, A. N., Analisis peran penting Indonesia dalam kerja sama ekonomi politik maritim. *Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Satya Negara Indonesia, Vol. 9, No. 2, hlm. 32, 2024.
- Arini, E., Ervina, Hartati, A. Y, Kerjasama Internasional Korea Selatan Dengan Indonesia (Studi Kasus Peningkatan Status Kerjasama Dari *Strategic Partnership* Menjadi *Special Strategic Partnership* Tahun 2017). *Jurnal Kajian Hubungan Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim Semarang, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Baumert, K, Limits in the Seas No. 143: China – Maritime Claims in the South China Sea, *Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs*, No. 143, 2014.
- Santoso, D., Fadhillah, Nafisah, Indonesia's Global Maritime Axis Doctrine: Security Concerns and Recommendations, *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol. 10, No. 2, 2017.
- Thuy, A., Nguyen., Science Journals: A New Frontline in the South China Sea Disputes, *Center for Strategic and International Studies Journal*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Aryawan, M. K. D., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. Hukum Internasional Sebagai Salah Satu Jenis Hukum Yang Penting Adanya Dalam Suatu Sistem Hukum. *Jurnal Ganesha Law Review*, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2, 2022.
- A'yun, S. Q, Teritorial Indonesia Pada Sengketa Laut China Selatan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Dinamika*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 28, No. 10, 2022.
- Andika, T. Kedaulatan di Bidang Informasi dalam Era Digital: Tinjauan Teori dan Hukum Internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Universitas Padjadjaran, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Budiono, I., Anggriawan, F. & Kusumandaru, P. Upaya Hukum dalam Pencegahan Klaim Tiongkok terhadap Laut Natuna Utara. *Bhirawa Law Journal*, Universitas Pasundan, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Callista, P. R., Idris, M. & Trihastuti, N. Klaim Tiongkok tentang Traditional Fishing Ground di Perairan Natuna Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Diponegoro Law Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 6, No. 2, 2017.
- Andaru, D, A., Djarot, Joint Development Agreement Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna. *Masalah-Masalah Hukum*, Universitas Diponegoro, Vol. 49, No. 4, 2020, hlm. 346.

- DPR RI., Kepatuhan Negara terhadap Perjanjian Internasional: Perspektif Politik dan Hukum. *Jurnal Kajian*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Farida. E., Kewajiban Negara Indonesia terhadap Perjanjian Internasional yang Telah Diratifikasi (Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families), *Administrative Law & Governance Journal*, Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Fernandes, I., Daulay, Z., Ferdi, & Delfiyanti. Status of Indonesia's sovereign rights in the north natuna sea conflict area consequences of China's nine-dash line claim. *Linguistics and Culture Review*, University of Andalas, Vol. 5, No. S3, hlm. 1775-1783, 2021.
- Firdaus, et al. Urgensi Resolusi Konflik Klaim Nine-Dash Line Tingkok di Perairan Natuna Utara. *Jurnal Ius Constituendum*, Universitas Bangka Belitung, Vol. 8, No. 2, 2023.
- Gao, Z. & Jia, B. B. The Nine-dash line in the South China Sea: History, Status, and Implications. *American Journal of International Law*, Cambridge University, Vol. 107, No. 1, 2013.
- Gustina, A. Kepemilikan Pulau-Pulau Kecil oleh Orang Asing dan Kedaulatan Maritim di Indonesia: Antara Regulasi dan Implikasi, *Jurnal Pembangunan Daerah*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, RI Vol. 5, No. 1, 2014.
- Bill Hayton, The South China Sea: Historical and legal background, *Council on Geostrategy*, Vol. 27, No. 24, 2024.
- Indra, M, Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Selat*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Juwana, H, Kewajiban Negara dalam Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional: Memastikan Keselarasan dengan Konstitusi dan Mentransformasikan ke Hukum Nasional. *Undang: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2019.
- Juwana, H, Konflik Laut Cina Selatan dan Kepentingan Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Kantjai, Marsita, Kewenangan Tribunal Internasional Hukum Laut dalam Penyelesaian Sengketa Kelautan menurut Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982. *Lex Privatum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. VII, No. 1, 2019.
- Kurnia, M, P, *Hukum Internasional (kajian Ontologis)*. *Jurnal Risalah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Vol. 4, No. 2, hlm. 80, 2008.
- Kumari Nandini, The Geopolitical Dynamics Of The South China Sea, *International Jourbal of Novel Reasearch and Development (INJRD)*, Vol. 9, No. 11, 2024.

- Mardiyati, Siti, Implementasi dan Penegakan Hukum Tata Negara Globalisasi, *Jurnal Ilmu Hukum Muhamadiyah Palembang*, Vol. 3. No. 1, 2024.
- Parthiana, I Wayan, Perjanjian Internasional Tak Tertulis Dalam Hukum Perjanjian Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia*, Vol. 11, No. 4, 1981.
- Purwanto, Harry, Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 21, No. 1, 2009.
- Ratna, Tuti, Good Faith dalam Implementasi Perjanjian Internasional. *Jurnal Keilmuan Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Vol. 5, No. 3, 2020.
- Riyanto, S, Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Yustisia*, Universitas Sebelas Maret, Vol. 1, No. 3, 2012.
- Ruhayat, Yayat, Peran Indonesia Dalam Menjaga Wilayah Laut Natuna Dan Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Vol. 29, 2017.
- Beckman, R. Schofield, C, Defining EEZ Claims from Islands: A Potential South China Sea Change, *The International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 29, 2014.
- Setiani, B, Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Azzahra, Vol. 14, No. 3, 2017.
- Kim, S, Kyoon, The Uncertain Status of the Korea-Japan Joint Development Agreement of the Continental Shelf and Its Prospects, *Asia-Pacific Journal of Ocean Law and Policy*, No. 2. Vol 7, 2022, hlm. 1–5.
- Yuliatiningsih, A, Penerapan Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt Berkaitan dengan Status Hukum Daerah Dasar Laut Samudera Dalam (Sea Bed). *Jurnal Dinamika Hukum*, Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10, No. 1, 2010.
- Yuli Ari Suistyani, Andhini Citra Pertiwi, Marina Ika Sari, Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration, *Politica*, Vol. 12 No. 1 Mei 2021.
- Gozali, E. Legalitas Klaim Tiongkok di Laut China Selatan Sebagaimana Digambarkan dalam Peta Terbaru Tahun 2023, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2024.
- Sari, C, Prinsip Good Faith (Itikad Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 26, No. 1, 2014.

- Sefriani, Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Ius Quia Iustum Journal of Law and Justice*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 23, No. 2, 2016.
- Oktaviani, D. Implementasi Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca melalui *Joint Crediting Mechanism* Periode. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Shalimah, Z, Strategi Indonesia dalam Menghadapi Klaim Nine-dash line Tiongkok di Wilayah Perairan Kepulauan Natuna pada Tahun 2014-2017, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Sikumbang, Z, A, Kebijakan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan Menurut UNCLOS 1982, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.
- Sophia Kopela, The Legal Value of Silence as State Conduct in the Jurisprudence of International Tribunals, *Australian Year Book of International Law*, Vol. 29, No. 1, 2010.
- Wardani, A. Kusumah, Budiawan. A, Urgensi Kerjasama Internasional Dalam Konsep Sound Governance, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Universitas Galuh, Vol. 8, No. 3, 2021.
- Position Paper of the Government of the People's Republic of China on the Matter of Jurisdiction in the South China Sea Arbitration Initiated by the Republic of the Philippines, 7 Desember 2014.
- Mori, Hiroshi, China's New *Ten-dash line* Map Infuriates Asian Neighbors. Japan Forward. <https://japan-forward.com/chinas-new-ten-dash-line-map-infuriates-asian-neighbors/>, diakses pada 22 Januari 2025.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam. <https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>, diakses pada 21 Januari 2025.
- Eddy Pratomo, Indonesia Denies Accepting China's South China Sea Claims, *Marine Insight*, 2024, <https://www.marineinsight.com/shipping-news/indonesia-denies-accepting-chinas-south-china-sea-claims-after-joint-statement/> diakses 5 Juni 2025
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Potensi Migas Natuna Jadi Andalan dan Jaga Kedaulatan Negara, Siaran Pers Nomor: 13.Pers/04/SJI/2020, 14 Januari 2020, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/potensi-migas-natuna-jadi-andalan-jaga-kedaulatan-negara>, diakses pada 17 Juni 2025.

Mahkamah Agung RI, Mahkamah Pidana Internasional dan Hukum Pidana Internasional, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/06.pdf>, diakses pada 20 Mei 2025.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2024, Keterangan Pers Tentang Kerja Sama Maritim RI-Tiongkok Dalam Joint Statement RI-Tiongkok, <https://kemlu.go.id/berita/keterangan-pers-tentang--kerja-sama-maritim-ri-tiongkok-dalam--pernyataan-bersama-ri-tiongkok?type=publication>, diakses pada 2 Juli 2025.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Klaim Peta Baru China Tabrak Batas Sejumlah Negara, Kedaulatan Indonesia Terancam. <https://bnpp.go.id/berita/klaim-peta-baru-china-tabrak-batas-sejumlah-negara-kedaulatan-indonesia-terancam>. Diakses 20 Desember 2024.

Dinas Pariwisata Natuna, Profil Kabupaten Natuna. <https://dinaspariwisata.natunakab.go.id/profil-kabupaten-natuna/>, diakses pada 21 Januari 2025.

DGA Group, ASEAN Tested on South China Sea Ruling, <http://dgagroup.com/insight/asean-tested-south-china-sea-ruling/>, diakses pada 26 Juni 2025.

Ghina Intan, Hubungan Indonesia-China Memanas, Jokowi Tinjau Situasi Natuna - VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/hubungan-indonesia-china-memanas-jokowi-tinjau-situasinatuna-/5238201.html> di akses pada 1 Juni 2025.

Hannah Beech, Just Where Exactly Did China Get the South China Sea Nine-Dash Line From?, Time, <https://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/>, diakses pada 20 Mei 2025.

Institute For Maritime And Ocean Affairs, <https://imoa.ph/treaties/unclos/chronological-list-of-ratifications> diakses pada 10 Juni 2025

New service, Indonesia drives Chinese coast guard ship from disputed waters in South China Sea, <https://hongkongfp.com/2024/10/27/indonesia-drives-chinese-coast-guard-ship-from-disputed-waters-in-south-china-sea/> diakses pada 25 Mei 2025.

Zheng Zhihua, Legal Implications of the Map of the South China Sea Islands of China under International Law, <http://www.scspi.org/en/dtfx/legal-implications-map-south-china-sea-islands-china-under-international-law> 20 Mei 2025.

Menjawab Provokasi Tiongkok di Laut Natuna - Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <https://law.ui.ac.id/v3/menjawab-provokasi-tiongkok-di-laut-natuna-2/> diakses pada 25 Mei 2025

Momen Jokowi 3 Tahun Silam 'Kirim Sinyal' ke China soal Natuna di KRI – detik News, <https://news.detik.com/berita/d-4846344/momen-jokowi-3-tahun-silam-kirim-sinyal-ke-china-soal-natuna-di-kri> diakses pada 25 Mei 2025.

Pasang Surut Perkara Laut China Selatan bagi RI di Pemerintahan Jokowi - CNN Indonesia <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241015152925-106-1155599/pasang-surut-perkara-laut-china-selatan-bagi-ri-di-pemerintahan-jokowi> diakses pada 25 Mei 2025.

DPR RI, Respons Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/download/2149/949> diakses pada 25 Mei 2025.

Reuters, Philippines, Taiwan, Malaysia reject China's latest South China Sea map, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/philippines-taiwan-malaysia-reject-chinas-latest-south-china-sea-map-2023-08-31/>, 2023. diakses pada 25 Mei 2025.

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China on the Award of 12 July 2016 of the Arbitral Tribunal in the South China Sea Arbitration Established at the Request of the Republic of the Philippines Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China https://www.mfa.gov.cn/eng/zy/gb/202405/t20240531_11367334.html diakses 19 Mei 2025

South China Sea Arbitration Ruling: What Happened and What's Next?, <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Issue%20Brief%20South%20China%20Sea%20Arbitration%20Ruling%20What%20Happened%20and%20What%27s%20Next071216.pdf> diakses pada 25 Mei 2025

Modern Diplomacy, South China Sea: A Threat to Regional Stability, 2024, <https://moderndiplomacy.eu/2024/11/28/south-china-sea-a-threat-to-regional-stability/> diakses 29 Juni 2025.

South China Sea Energy Exploration and Development, <https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/> diakses 5 Juni 2025.

U.S. Energy Information Administration (EIA), Regional Analysis Brief: South China Sea, 2024, https://www.eia.gov/international/analysis/regions-of-interest/South_China_Sea diakses pada 5 Juni 2025.

RiverheadFoundation, The concept and principles of the international law of the sea, 2022, <https://www.riverheadfoundation.org/concept-and-principles-of-the-international-law-of-the-sea/> diakses 20 Mei 2025.

The Diplomat, Indonesia's Foreign Policy Under Prabowo: Still Free But More Active?, 2025, <https://thediplomat.com/2025/03/indonesias-foreign-policy-under-prabowo-still-free-but-more-active/> diakses pada 2 Juni 2025.

Terkait Laut China Selatan, Gedung Putih: Indonesia Sebaiknya Bekerja dengan Pakar Hukumnya. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/terkait->

[laut-china-selatan-gedung-putih-indonesia-sebaiknya-bekerja-dengan-pakar-hukumnya-/7862086.html](https://www.laut-china-selatan-gedung-putih-indonesia-sebaiknya-bekerja-dengan-pakar-hukumnya-/7862086.html), diakses pada 15 Desember 2024.

The Economist, How the “nine-dash line” fuels tensions in the South China Sea, 2023, <https://www.economist.com/the-economist-explains/2023/02/10/how-the-nine-dash-line-fuels-tensions-in-the-south-china-sea>

The Institute of Foreign Affairs and National Security (IFANS), 2016, China's Response in the Wake of the South China Sea Arbitration, <https://www.ifans.go.kr/knda/com/fileupload/FileDownloadView.do;jsessionid=08VUyWOM9Ahq5QgCz2QnaUyy.public21?storeId=c61b04e5-0182-4c75-ad21-828ecacfb855&uploadId=3684236527465997&fileSn=1>, diakses pada

The Jakarta Post, Prabowo's 'Good Neighbor' Foreign Policy to Prioritize Economic, Food Security, <https://www.thejakartapost.com/indonesia/2024/05/14/prabowos-good-neighbor-foreign-policy-to-prioritize-economic-food-security.html> diakses 20 Juni 2025

Tim CNN Indonesia, Harta Karun Raksasa RI: Cadangan Gas Natuna Terbesar di Dunia, CNN Indonesia, 23 Mei 2023, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230523113155-85-952819/harta-karun-raksasa-ri-cadangan-gas-natuna-terbesar-di-dunia>, diakses pada 17 Juni 2025.

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration>, diakses pada 22 Maret 2025

